

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan IV Koto Aur Malintang

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	No	Pernyataan	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Rencana Aksi	Target Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target				Jenis Kegiatan Aksi	Anggaran
														TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase Pelaksanaan pemeliharaan sebagian Ususan Pemerintahan Bupati kepada Camat	Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelaksanaan ususan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselesaikan di tingkat Kecamatan	100%	1	Belum Maksimanya koordinasi dengan laporan terkait pengaman tanggapan dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketertiban dan Ketertiban Umum	Persentase Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	100%	Meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dalam pengamanan lingkungan dan ketertiban umum	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3	3	3	Melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan lingkungan dan ketertiban umum	
						2	Rendahnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat				Meningkatkan koordinasi antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	3	3	3	3	Melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan antar tokoh agama dengan tokoh masyarakat	
						3	Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan ususan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100%	Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Borneka Tunggal Ka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	0	50	0	1. Peningkatan HUT kemerdekaan RI 2. Kegiatan Pasukba	
									Persentase Peta Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	70%									
						4	Malah lambatnya proses persiapan pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan				Melaksanakan kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Semua Ususan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	3	3	3	3	Melaksanakan pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	
						5	Malah rendahnya pelaksanaan kegiatan bersinergi keagamaan dalam masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan ususan pemerintahan terkait	1. Nilai PK PPP Mandiri Kecamatan	25%	Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan di kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Pemecanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tingkat (Laporan)	3	3	3	3	Meningkatkan sinergi terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan di kecamatan	
									2. Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%									
						6	Belum Maksimanya pembinaan UKS kesekolah				Meningkatkan koordinasi antara tim pembina UKS di pihak sekolah terkait peningkatan pembinaan UKD di kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	1	1	1. Koordinasi pihak terkait UKS 2. Melaksanakan pembinaan UKS	
						7	Belum adanya SOP Pelayanan				Pembuatan SOP sesuai Pelayanan yang ada	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1	1	Pembuatan SOP Pelayanan	
											Tertaksananya Ususan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	3	3	3	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	2. Persentase Pelaksanaan Penerimaan Sebagian Ususan Pemerintahan Bupati kepada Camat	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan desa		Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan desa	75%	1	Usulan dari masyarakat fokus diungkap dengan data, dukungan yang lebih terinci dan fokus seperti izin lahan, proposal bantuan, dll	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa	1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	Melakukan usulan dengan data dukungan yang terinci	8 Lembaga Masyarakat adat	Jumlah Lembaga Masyarakat adat yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Masyarakat adat)	8	0	0	0	Melaksanakan kegiatan Musyembang Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan musyembang tingkat Nagari	4.000.000
						2	Perkembangan program PKK di nagari		2. Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30%	Melaksanakan pembinaan PKK di tingkat nagari, Fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3	3	3	Monitoring PKK ke Nagari	12.666.500
						3	Peningkatan kapasitas perangkat nagari	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	25%	Melakukan Pembinaan administrasi	12 Laporan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	3	3	3	3	1. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	2.390.000

2	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	3. Nilai SAKP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,75	1	Masih kurang optimalnya penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penetapan rekomendasi LHE SAKIP yang diindikasikan	100%	Melengkap dokumen perencanaan	6 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	3	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	550.000
									2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84	Melaksanakan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.640.000
									3. Penilaian Temuan BPK yang diindikasikan	100%	Terdapatnya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12	12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.610.746
											Terdapatnya pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3	3	3	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.440.000
											Menyusun laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
											Terdapatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.300.500
											Terdapatnya Positron Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	Jumlah Paket Positron Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	6	6	Penyediaan Positron Rumah Tangga	
											Menyusun laporan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.053.000
											Menyusun laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	3	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.410.500
											Terdapatnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.650.000
											Terdapatnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	11.500.000
											Terdapatnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.500.000
											Terdapatnya pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.425.000



